

Gerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Dalam Melawan Partai Komunis Indonesia (PKI) Pada Pasca Peristiwa Gestapu 1966

Shalahuddin Al Ayyubi I. M¹, Iqbal Hidayat M², M. Hasbi Nabil³, Ahmad Maftuh Sujana⁴,

^{1,2,3,4}Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin dan Adab, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, Indonesia.

Email: ¹shalahuddinalayyubi0407@gmail.com, ²iqbalhidayat437@gmail.com, ³hasbi.nabil@icloud.com, ⁴maftuhsujana@gmail.com.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang perjuangan HMI melawan PKI dalam konteks politik Indonesia pada masa Orde Lama. HMI menghadapi berbagai tantangan, termasuk propaganda, pelecehan, dan ancaman fisik dari PKI yang ingin membubarkan organisasi tersebut. Namun, HMI, dengan dukungan dari pihak militer dan organisasi anti-komunis lainnya, berhasil bertahan dan memainkan peran penting dalam menekan PKI. Pembubaran PKI setelah peristiwa G30S menjadi bukti kekuatan dan ketahanan HMI dalam menghadapi ancaman ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan Pancasila. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jalannya gerakan HMI dalam melawan PKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan organisasi mahasiswa Islam yang menjadi salah satu target utama pengganjangan oleh PKI dalam rangka perebutan hegemoni ideologi dan kekuasaan menjelang meletusnya Gerakan 30 September 1965. Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan melalui pendekatan studi pustaka dan dokumentasi sejarah yang relevan dengan pokok kajian, yaitu konflik ideologis antara Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada era 1960-an. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang generasi muda, khususnya aktivis mahasiswa, dapat belajar dari sejarah ini tentang pentingnya integritas, kesiapan ideologis, dan ketahanan organisasi dalam menghadapi tekanan politik ekstrem.

Kata kunci: PKI, HMI, G30S, Gerakan, Perlawanan.

Pendahuluan

Sebelum berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada tahun 1947, berbagai organisasi Islam telah lebih dahulu tumbuh dan berkembang di Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut berperan aktif dalam berbagai bidang seperti sosial-ekonomi, kebudayaan, kemasyarakatan, serta politik, sebagai respons terhadap dinamika global dan pengaruh pembaruan dalam dunia Islam.

Munculnya gerakan pembaruan ini mendorong umat Islam di Indonesia untuk membentuk wadah-wadah pergerakan modern. Di antara



organisasi tersebut ialah Serikat Dagang Islam (SDI), Jong Islamieten Bond (JIB), Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), dan Partai Masyumi. Berdiri pada tahun 1911, SDI dipandang sebagai pelopor organisasi pergerakan Islam di Indonesia. Awalnya berfokus pada penguatan ekonomi umat, SDI kemudian berkembang menjadi Syarekat Islam (SI) yang secara terbuka terlibat dalam perjuangan politik melawan kolonialisme dan menjadi salah satu kekuatan politik radikal yang signifikan dalam sejarah pergerakan nasional (Abdurrahman Dkk, 2000).

Dalam lanskap semangat kebangsaan tersebut, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hadir sebagai wadah perjuangan mahasiswa Muslim. Organisasi ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 1947, atau bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah. Diprakarsai oleh Lafran Pane bersama sejumlah mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI), HMI lahir sebagai respons terhadap krisis identitas dan kondisi sosial-politik umat Islam serta bangsa Indonesia yang sedang berada dalam masa transisi pasca-kemerdekaan. Misi awal pendirian HMI tidak hanya untuk membina keislaman mahasiswa, tetapi juga untuk mengambil peran aktif dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tekanan imperialisme Barat yang telah menindas bangsa sejak abad ke-16 (Dimas Aji Prayoga dkk, 2023).

Situasi politik nasional pada saat itu berada dalam keadaan yang sangat genting. Pemerintahan Indonesia tengah menghadapi agresi militer besar-besaran oleh Belanda yang berusaha kembali menguasai wilayah-wilayah strategis Indonesia. Tindakan Belanda tersebut merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian Linggarjati, yang sebelumnya telah mengakui kemerdekaan de facto Indonesia. Ketegangan ini mendorong seluruh elemen masyarakat, termasuk para pelajar dan mahasiswa, untuk kembali turun tangan dalam mempertahankan kedaulatan negara. Dalam kondisi yang demikian, HMI memosisikan diri sebagai kekuatan intelektual Islam yang turut berperan dalam menggerakkan semangat perjuangan nasional melalui jalur pendidikan, advokasi sosial, dan dakwah kebangsaan (Victor Tanja, 1991).

Belum selesai menghadapi tekanan eksternal dari Belanda, Indonesia kembali dihadapkan pada ancaman internal melalui pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada bulan September 1948. Di tengah kondisi bangsa yang masih rentan akibat agresi militer Belanda, PKI secara terang-terangan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Republik Indonesia yang sah. Dipimpin oleh Muso, mereka memproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia dan membentuk pemerintahan front nasional pada 19 September 1948. Tindakan ini bukan saja mengkhianati perjuangan kemerdekaan, tetapi juga memperuncing polarisasi politik dalam negeri dan menjadi catatan kelam dalam sejarah pergerakan bangsa Indonesia (Andi Kurniawan dkk, 2017).

Ketika pemberontakan yang dilakukan oleh PKI terjadi dan menyebabkan banyak kehilangan nyawa, terutama di kalangan umat Islam seperti para ulama, kiai, pendidik, tokoh nasionalis, serta pejabat sipil dan militer, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tidak berdiam diri. Dalam kondisi kritis itu, Pengurus Besar HMI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Achmad Tirtosudiro segera mengambil inisiatif dengan mendirikan Corps Mahasiswa (CM) yang berfungsi sebagai tempat saling koordinasi untuk perlawanan mahasiswa. Hartono ditunjuk sebagai pemimpin CM, sementara Achmad Tirtosudiro juga menjabat sebagai wakil pemimpin sekaligus menggantikan Suripno sebagai Ketua PPMI, setelah diketahui bahwa Suripno terlibat dalam pemberontakan bersama PKI. Melalui CM, para kader HMI bergerak ke berbagai daerah untuk membantu pihak pemerintah dalam menanggulangi tindakan pemberontakan itu. Selain berfungsi sebagai kekuatan moral dan intelektual, anggota HMI juga terjun langsung ke medan, meninggalkan sementara kegiatan perkuliahan, serta mengangkat senjata sederhana, seperti bambu runcing, untuk mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman ideologi komunis dan kolonialisme yang masih mengintai (Agussalim Sitompul, 2008).

Sebagai organisasi kader, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menempatkan nilai-nilai keislaman sebagai fondasi utama dalam proses pembinaan anggotanya. Setiap kader diharapkan tidak hanya memahami ajaran agamanya secara mendalam, tetapi juga mampu

mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial, akademik, dan kebangsaan di manapun ia berada. Komitmen terhadap misi keislaman ini menjadi landasan kuat bagi eksistensi HMI dalam setiap fase sejarah bangsa Indonesia. Sejak didirikan, HMI terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik dalam jumlah cabang maupun pengaruhnya. Hingga kini, tercatat sebanyak 202 cabang telah berdiri dari Sabang hingga Papua, dilengkapi oleh 20 Badan Koordinasi (BADKO) yang mengatur sinergi antar cabang secara regional, menunjukkan daya sebar dan daya jangkau organisasi yang sangat luas dalam dunia kemahasiswaan dan kepemudaan nasional. (Dimas Aji, 2020).

Perjalanan HMI dalam kancah sejarah nasional tidaklah mudah. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga pergolakan politik Orde Lama, HMI terus memainkan peran penting sebagai kekuatan moral dan intelektual dalam mempertahankan ideologi bangsa. Ketika Indonesia dihadapkan pada ancaman nyata dari gerakan komunisme, khususnya pada puncak konflik dengan PKI, HMI tampil sebagai garda terdepan dalam mempertahankan dasar negara Pancasila dan keutuhan NKRI. Peran ini berlanjut hingga masa transisi menuju Orde Baru, di mana HMI semakin berkembang seiring pertumbuhan institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Diterima dengan baik oleh kalangan mahasiswa dan masyarakat luas, HMI berhasil menempatkan dirinya sebagai organisasi strategis yang tak hanya fokus pada pembinaan kader intelektual, tetapi juga turut aktif dalam menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa melalui perjuangan yang adaptif dan modern. (Andi Kurniawan dkk, 2017).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif historis, dengan fokus pada rekonstruksi peristiwa dan analisis peran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dalam menghadapi Partai Komunis Indonesia (PKI), terutama pada era sebelum dan sesudah peristiwa G30S/PKI.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis, karena bertujuan merekonstruksi peristiwa-peristiwa masa lalu

secara sistematis dan kritis, terutama berkaitan dengan dinamika hubungan antara Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada era 1960-an. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri jejak konflik ideologi, politik, serta peran mahasiswa Islam dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila di tengah prahara nasional menjelang dan sesudah Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI).

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif, yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial-historis melalui analisis naratif atas sumber-sumber tertulis dan dokumen sejarah. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis secara statistik, tetapi lebih fokus pada interpretasi dan pemaknaan terhadap data sejarah yang ditemukan.

Untuk mendukung validitas data, digunakan berbagai sumber yang relevan, seperti karya M. Alfian Alfian dalam bukunya *HMI 1963–1966: Menegakkan Pancasila di Tengah Prahara* (2014), yang mengupas peran HMI dalam menjaga Pancasila di tengah tekanan ideologis PKI. Juga digunakan penelitian Kurniawan, Andi dkk. (2017) mengenai perkembangan HMI di Banda Aceh serta karya Prayoga, Dimas Aji dkk. (2020) mengenai perkembangan organisasi HMI di Pacitan. Selain itu, referensi historis penting juga diambil dari Salim Haji Said dalam *Gestapu 65* (2015) serta Agussalim Sitompul dalam *Sejarah Perjuangan HMI 1947–1975* (2008), yang memberikan gambaran menyeluruh tentang konflik, perjuangan, serta strategi politik HMI dalam menghadapi tekanan rezim dan kekuatan kiri pada masa itu.

Dengan menggabungkan pendekatan historis dan analisis kualitatif ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi HMI dalam pertarungan ideologi nasional antara Islam, Komunisme, dan Nasionalisme sekuler pada masa transisi menuju Orde Baru.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis:

- a. Sebagai sumber primer, digunakan dokumen-dokumen sejarah, arsip organisasi, serta kesaksian dan testimoni pelaku sejarah. Salah satunya adalah karya M. Alfian Alfian berjudul *HMI 1963–1966: Menegakkan Pancasila di Tengah Prahara* (2014), yang memuat narasi dari pelaku langsung dan menjelaskan posisi HMI dalam konstelasi politik nasional saat itu. Selain itu, buku Salim Haji Said berjudul *Gestapu 65* (2015) memberikan rekonstruksi peristiwa politik nasional menjelang dan sesudah Gerakan 30 September, termasuk peran HMI dan dinamika kekuatan militer serta mahasiswa.
- b. Sumber sekunder, penelitian ini menggunakan studi-studi akademik yang menganalisis perkembangan HMI dari sudut pandang historis maupun sosiologis.

Artikel Kurniawan, Andi dkk. dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa (HIM) Pendidikan Sejarah Unsyiah Vol. 2 No. 3 Tahun 2017, membahas perkembangan HMI di Banda Aceh secara lokal, memberikan perspektif daerah terhadap dinamika nasional. Demikian pula karya Dimas Aji Prayoga dkk. yang berjudul *Sejarah Perkembangan Organisasi Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Pacitan Tahun 1998–2020*, meskipun mencakup periode yang lebih modern, tetap relevan untuk melihat kesinambungan gerakan HMI dari masa lampau ke masa kini.

Buku Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan HMI 1947–1975* (2008), juga menjadi referensi penting sebagai sumber yang merangkum perjalanan panjang organisasi ini, serta memberikan latar belakang historis yang memperkuat analisis. Buku ini dikategorikan sebagai sumber sekunder karena merupakan hasil refleksi dan kompilasi dari berbagai peristiwa yang telah dikaji oleh penulis.

Dengan menggabungkan sumber primer dan sekunder, penelitian ini bertujuan menyajikan analisis sejarah yang valid dan mendalam tentang konflik ideologis antara HMI dan PKI, serta peran mahasiswa Islam dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila di tengah ancaman komunisme.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan melalui pendekatan studi pustaka (*library research*) dan dokumentasi sejarah.

Studi pustaka dimaksudkan sebagai teknik untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai literatur, baik berupa buku, artikel ilmiah, maupun arsip yang relevan dengan pokok kajian, yaitu konflik ideologis antara Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada era 1960-an.

Peneliti menggunakan berbagai referensi utama sebagai bahan analisis, seperti karya M. Alfian Alfian dalam *HMI 1963–1966: Menegakkan Pancasila di Tengah Prahara* (2014), yang secara eksplisit menyoroti dinamika dan posisi HMI sebagai kekuatan anti-komunis dalam pusaran konflik ideologis nasional. Selain itu, buku Salim Said berjudul *Gestapu 65* (2015) dijadikan rujukan penting dalam memahami peristiwa politik besar yang melibatkan PKI dan dampaknya terhadap kekuatan mahasiswa Islam. Dokumentasi historis lainnya seperti Sitompul (2008) dalam *Sejarah Perjuangan HMI 1947–1975* memberikan rekam jejak panjang kiprah HMI sebagai organisasi mahasiswa Islam yang aktif dalam perjuangan ideologis dan politik.

Jurnal ilmiah karya Andi Kurniawan dkk. (2017) dan tulisan Dimas Aji Prayoga dkk. (2020) digunakan untuk menelusuri perkembangan HMI secara lokal dan regional, serta sebagai bahan perbandingan dengan konteks nasional. Dengan pendekatan dokumentasi ini, peneliti dapat menelaah dokumen-dokumen tertulis, arsip organisasi, laporan kongres, pidato tokoh, dan pemberitaan media sebagai data pendukung untuk menganalisis dinamika sosial-politik yang melatarbelakangi gerakan mahasiswa Islam.

Dengan menggabungkan teknik studi pustaka dan dokumentasi sejarah, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan kritis terhadap hubungan antara HMI dan PKI, serta posisi strategis HMI dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila dan keislaman di tengah konflik ideologis nasional.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Langkah-langkahnya meliputi:

- a. Heuristik: Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan. Sumber-sumber tersebut antara lain:
- 1) *HMI 1963–1966: Menegakkan Pancasila di Tengah Prahara* oleh M. Alfian Alfian (2014), yang memberikan gambaran detail tentang posisi ideologis dan gerakan HMI di tengah tekanan politik rezim Orde Lama.
 - 2) Artikel jurnal oleh Andi Kurniawan dkk. (2017) tentang perkembangan HMI di Banda Aceh, yang menunjukkan dinamika lokal organisasi ini dalam menghadapi perubahan politik nasional.
 - 3) Karya Dimas Aji Prayoga dkk. (2020) yang mendokumentasikan sejarah HMI cabang Pacitan, relevan untuk melihat kesinambungan pasca-Orde Lama.
 - 4) *Gestapu 65* oleh Salim Said (2015), sebagai sumber penting dalam memahami konteks dan aktor politik di balik peristiwa G30S dan keterkaitannya dengan PKI.
 - 5) *Sejarah Perjuangan HMI 1947–1975* oleh Agussalim Sitompul (2008), sebagai dokumentasi panjang perjalanan HMI sejak berdiri hingga masa-masa kritis menghadapi PKI.
- b. Verifikasi: Setelah sumber dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan kritik sumber untuk menilai keaslian (kritik eksternal) dan kebenaran isi (kritik internal). Misalnya, kesaksian atau narasi dalam buku Agussalim Sitompul dan Salim Said dibandingkan untuk melihat konsistensi data tentang keterlibatan HMI dalam penumpasan G30S/PKI. Sumber-sumber jurnal ilmiah seperti tulisan Andi Kurniawan dkk. juga diverifikasi validitasnya berdasarkan metode penulisan ilmiah dan institusi penerbit.
- c. Interpretasi: Pada tahap ini, peneliti menafsirkan keterkaitan antara peristiwa sejarah, tokoh, dan dinamika ideologis antara HMI dan PKI. Misalnya, peran HMI sebagai kekuatan anti-komunis dianalisis dalam konteks dominasi PKI pada masa Demokrasi Terpimpin, sebagaimana dijelaskan oleh Alfian dan Said. Penafsiran ini memungkinkan penyusunan argumentasi yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga

analitis mengenai posisi strategis HMI dalam menghadapi upaya pembubaran oleh PKI.

- d. Historiografi: Tahap akhir adalah penulisan atau penyusunan narasi sejarah yang sistematis berdasarkan hasil analisis dari sumber-sumber yang telah diverifikasi. Narasi ini disusun secara kronologis dan tematis, mulai dari awal munculnya konflik antara HMI dan PKI, puncaknya menjelang G30S, hingga peran HMI dalam pembentukan aliansi anti-komunis seperti KAMI dan proses penyelamatan organisasi pasca-Orde Lama.

5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengandalkan berbagai sumber pustaka sebagai data utama, antara lain: HMI 1963–1966: Menegakkan Pancasila di Tengah Prahara karya M. Alfian Alfian (2014), yang menjadi rujukan penting untuk memahami dinamika HMI pada masa puncak ketegangan politik nasional; artikel jurnal karya Andi Kurniawan dkk. (2017) yang mengulas perkembangan HMI di Banda Aceh sebagai studi kasus wilayah; serta buku Sejarah Perkembangan Organisasi Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Pacitan Tahun 1998–2020 oleh Dimas Aji Prayoga dkk., yang memberikan gambaran perkembangan cabang lokal HMI dalam konteks pasca-Orde Baru. Selain itu, buku Gestapu 65 oleh Salim Haji Said (2015) digunakan sebagai rujukan utama dalam menganalisis konteks sejarah nasional dan peran militer, sedangkan Sejarah Perjuangan HMI 1947–1975 oleh Agussalim Sitompul (2008) menjadi sumber kronologis perjuangan HMI secara umum.

Adapun lokasi penelitian dilakukan secara kepustakaan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Perpustakaan Perguruan Tinggi, serta akses jurnal daring seperti Portal Garuda dan Unsyiah Journal System. Penelusuran sumber juga dilakukan melalui digital library penerbit dan arsip media cetak nasional yang memuat berita peristiwa antara tahun 1948 hingga pasca-G30S/PKI 1965.

Waktu penelitian dilaksanakan selama semester aktif tahun akademik 2024–2025, dimulai dari bulan Februari hingga Mei 2025. Durasi penelitian disesuaikan dengan jadwal akademik dan ketersediaan

sumber, serta mempertimbangkan kebutuhan analisis historis yang mendalam terhadap konflik antara HMI dan PKI dalam konteks sejarah politik Indonesia.

Pembahasan/Hasil

A. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan organisasi Mahasiswa Islam terbesar pada waktu itu. HMI juga terkenal dengan gerakannya yang anti-Komunisme, hingga partai komunis Indonesia (PKI) melakukan beberapa gerakan-gerakan untuk membubarkan HMI di Indonesia. (RMOL.id, 2020) Konflik antara umat Islam dan Komunis yang makin memanas di Indonesia juga menjadi salah satu penyebab terjadinya gerakan pengganyangan PKI terhadap organisasi-organisasi Islam di Indonesia salah satunya yaitu HMI.

Dari segi Nasional, kita melihat di mana aplikasi NASAKOM mulai memberi kesempatan ke arah terganggunya keseimbangan kekuatan politik. Hal ini disebabkan karena secara kualitatif, ormas/ orpol terutama yang menjadi anggota poros NASAKOM (PNI-NU-PKI, Penulis) adalah berbeda, baik kualitatif kerapian organisasi maupun kualitatif militansi. Peranan pemersatu relatif baik. Hal ini juga dilihat dibuktikan oleh "*goodwill*" yang diberikan ormas/orpol/tokoh-tokoh Islam pada Kongres ke-7. Sementara itu, Kongres. ke-7 telah memberikan landasan yang jelas dan tegas dalam menghadapi situasi untuk dikembangkan dalam situasi selanjutnya Yang dimaksud dengan "oleh beberapa kalangan kekuatan politik" adalah kekuatan PKI/CGMI dan antek-anteknya. Dendam kesumat PKI terhadap HMI sudah timbul sejak pengkhianatan PKI di Madiun tahun 1948. (Agus Salim Sitompul, 2008)

Pada dini hari tanggal 15 Januari 1965, sebuah insiden tragis terjadi di Kanigoro, Jawa Timur, ketika para peserta pelatihan kader Pelajar Islam Indonesia (PII) tengah bersiap menunaikan salat subuh di masjid. Tanpa peringatan, sekelompok pemuda yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) secara brutal menyerbu lokasi tersebut. Dalam serangan mendadak itu, para kader PII mengalami kekerasan fisik yang serius, dan

lebih dari itu, tindakan profan terhadap simbol-simbol suci agama Islam dilakukan—Al-Qur'an diinjak-injak tanpa rasa hormat.

Peristiwa penistaan ini menyulut kemarahan yang luar biasa dari kalangan ulama dan santri, terutama di wilayah pesantren-pesantren Jawa Timur dan Jawa Tengah. Gelombang emosi keagamaan ini kemudian menjadi salah satu latar belakang kuat dalam mobilisasi massa pesantren pasca meletusnya peristiwa Gerakan 30 September (Gestapu), di mana sejumlah kiai dan santri dikabarkan turut aktif dalam operasi penumpasan terhadap simpatisan dan kader PKI sebagai bentuk balas dendam dan pembelaan terhadap kehormatan agama yang telah dinistakan. (Salim Haji Said, 2015)

Dalam rangkaian gerakan aksi sepihak yang digalang oleh Barisan Tani Indonesia (BTI), sejumlah sasaran utama dari agitasi mereka mencakup tanah-tanah milik pesantren—yang sebagian besar merupakan tanah wakaf—serta aset milik para tokoh Marhaenis. Tak hanya itu, gerakan yang didukung oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi-organisasi massanya juga secara terang-terangan menyerang institusi agama secara keseluruhan.

Di wilayah Jawa Tengah, misalnya, kelompok kesenian ketoprak yang tergabung dalam Bakoksi (Badan Koordinasi Ketoprak Seluruh Indonesia) dan berafiliasi dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), aktif berkeliling ke berbagai daerah mempertunjukkan lakon-lakon yang bernuansa penistaan terhadap simbol-simbol keagamaan. Lakon-lakon seperti “*Matine Gusti Allah*” (kematian Tuhan), “*Gusti Allah Manten*” (Tuhan menikah), “*Malaikat Kimpol*” (malaikat berhubungan intim), serta “*Gusti Allah Ngunduh Mantu*” (Tuhan menjemput menantu) dipentaskan secara vulgar dan provokatif. Penistaan ini tidak hanya ditujukan kepada umat Islam; komunitas Katolik pun menjadi sasaran serangan, di mana Bakoksi menampilkan sandiwara berjudul “*Paus Rabi*” yang mengisahkan pemimpin tertinggi umat Katolik melakukan pernikahan—sebuah penghinaan terhadap dogma dan nilai-nilai sakral gereja. Seluruh aksi tersebut mencerminkan upaya sistematis PKI dan sayap kebudayaannya dalam

merusak tatanan moral dan keagamaan bangsa Indonesia pada masa itu. (Salim Haji Said, 2015)

Pertunjukan wayang kulit juga menjadi media mereka mengejek Agama Islam. Pada titik inilah barangkali bisa dikatakan terjadinya persinggungan antara visi Komunis terhadap agama, dan sikap orang-orang abangan yang pada dasarnya risi terhadap kaum santri. Sebagai reaksi terhadap pelecehan Agama dan gerakan aksi sepihak yang dilancarkan oleh PKI, di Jawa Tengah dan Jawa Timur berkali-kali terjadi bentrokan fisik antara golongan Komunis melawan kaum Nasionalis dan orang-orang pesantren. (Salim Haji Said, 2015)

Meski hubungan antara PNI dan PKI terlihat akrab di Jakarta, di pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur, para pendukung mereka justru terlibat bentrokan fisik jauh sebelum peristiwa G30S/PKI. Dalam bukunya *Kaum Merah Menjarah*, Prof. Aminuddin Kasdi mencatat, menurut pengakuan pimpinan BTI Jawa Timur, antara Agustus 1964 hingga Januari 1965, terjadi kekerasan yang mengakibatkan empat kader PKI/BTI tewas, 43 petani luka-luka, 409 orang ditahan, serta puluhan hektar lahan dan rumah dirusak. Namun, jumlah korban dari pihak lawan PKI tidak tercatat dalam laporan tersebut. (Salim Haji Said, 2015)

B. Tuduhan dan Upaya Pembubaran HMI

Prof. Drs. Lafran Pane, dalam sambutannya pada peringatan Dies Natalis ke-19 HMI Cabang Yogyakarta, tanggal 5 Februari 1966, dalam mengungkapkan apa sebabnya HMI jadi lawan utama PKI, antara lain, mengatakan:

Sebagai organisasi mahasiswa yang telah berdiri sebelum meletusnya Pemberontakan Madiun tahun 1948, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menunjukkan keterlibatan aktif dalam menjaga keutuhan Republik Indonesia. Salah satu kontribusi nyatanya adalah melalui Corps Mahasiswa (CM), sebuah organisasi yang dipimpin oleh kader HMI sendiri dan berperan penting dalam membantu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menghadapi pemberontakan yang dipelopori oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Keterlibatan ini menegaskan posisi HMI sebagai elemen strategis

dalam perjuangan melawan komunisme dan menjelaskan mengapa HMI kemudian dianggap sebagai salah satu kekuatan yang paling bertentangan dengan PKI dalam lanskap politik dan ideologi nasional.

Secara ideologis, perbedaan mendasar antara HMI dan PKI menjadi fondasi utama dari rivalitas yang tajam di antara keduanya. HMI secara resmi menjadikan Islam sebagai asas perjuangannya, mengedepankan nilai-nilai keimanan, moralitas, dan keadaban sebagai dasar pembentukan kader bangsa. Sebaliknya, PKI berlandaskan pada paham komunisme yang menolak agama sebagai basis ideologi dan mengusung materialisme historis dalam perjuangannya. Perbedaan ideologi yang sangat kontras ini tidak hanya memicu benturan pemikiran, tetapi juga menimbulkan konflik sosial-politik yang intens, di mana kedua pihak saling mencurigai, menolak eksistensi satu sama lain, dan dalam banyak kesempatan, saling berupaya untuk menghapus pengaruh lawan dari arena politik nasional.

HMI sebagai organisasi pembinaan kader untuk mencetak cendekiawan muslim tentunya tidak dikehendaki oleh PKI karena menurut PKI golongan umat Islam adalah golongan yang paling menentang paham komunis untuk berkembang di Indonesia. Selain itu HMI sebagai organisasi mahasiswa juga gigih dalam melakukan upaya melawan PKI semenjak peristiwa pemberontakan PKI Madiun. (Wiwid Ferdiawan, 2015).

Lawan-lawan utama berat PKI, seperti Masyumi, PSI, dan GPII, dengan berbagai dalih dan fitnahan, berhasil dipaksa bubar tahun 1960 dan 1963. Tinggal HMI, PII, GASBIINDO, dan Muhammadiyah, yang mereka juluki barisan "reaksioner dan kepala batu". PKI berpendapat, tuntutan pembubaran HMI harus diutamakan. HMI dipandang sebagai front Islam yang terkuat sesudah Masyumi dan GPII, mengingat HMI mempunyai anggota yang banyak, sebagai calon Sarjana dan Pemimpin. (Agussalim Sitompul, 2008).

Di awal tahun 1964, mulailah kelihatan timbulnya usaha-usaha terbuka dari PKI/CGMI berupa aksi-aksi tuntutan pembubaran HMI. Dalam jangka 4 tahun sejak tahun 1960, PKI telah berhasil menguasai sebagian besar aparat Pemerintahan. Manipol-Usdek lahir tahun 1960, NASAKOM

(Nasional-PNI), Agama (NU), Kom (PKI) dicetuskan di Istana Tampak Siring, Bali tahun 1961.

Keunggulan ini membuat barisan PKI semakin berani memojokkan semua lawan politiknya, khususnya umat Islam, yang mereka kategorikan sebagai antek-antek Masyumi, sehingga PKI menjadi "Partai Pemerintah" dan akan menjadi "Penguasa Tunggal" di Republik ini. Presiden Soekarno sudah berhasil digarap, berada di bawah pengaruh PKI. (Agussalim Sitompul, 2008).

Ketika itu terjadi polarisasi yang demikian tajam antara Islam dan Non-Islam. HMI, misalnya dituduh sebagai onderbouw Masyumi dianggap sebagai kekuatan reaksioner berhadapan dengan CGMI dan GMNI yang oleh Bung Karno dianggap sebagai kekuatan revolusioner.

C. Strategi HMI Menghadapi Tekanan

Walaupun tidak sepenuhnya dipandang tepat oleh aktivis HMI saat itu, penjelasan Nurcholis menggaris bawahi bahwa HMI tengah berada di era penuh prahara pada masa itu. Nurcholish memakai istilah *fight for (amar ma'ruf)* atau perjuangan proaktif, dan *fight against (nahiy munkar)* atau perjuangan reaktif. Jika secara analisa, kita lakukan identifikasi tema perjuangan *fight against* di satu pihak dan *fight for* di pihak lain, tidaklah berarti bahwa salah satu diantara keduanya itu, Tetapi jelas ada saat-saat ketika salah satu dari keduanya itu lebih penting. Misalnya ketika tahun 1960-an, mungkin juga awal 1970-an, tekanan perjuangan HMI lebih banyak kepada *fight against*, yaitu perjuangan melawan kaum pendukung ideologi yang anti-agama dan anti-Pancasila, khususnya PKI. (M. Alfian Alfian, 2014)

Perhitungan dan kebijaksanaan baru kepada HMI digariskan. HMI dianggap sebagai perintang dalam mencapai berbagai maksud dan tujuan PKI. Karenanya, HMI harus bubar sekarang juga dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Menurut perhitungan PKI, seandainya HMI belum bubar dinelum dicetuskannya Gestapu, kelak jika PKI gagal, sudah tentu HMI akan bangkit dan tampil ke depan menumpas Gestapu/PKI, sebagaimana diperbuat HMI, melalui Corps Mahasiswa, nienghancurkan

pemberontakan PKI di Madiun, 18 September 1948.(Agussalim Sitompul, 2008))

Jika ditautkan dengan salah satu keputusan Kongres ke-2 CGMI di Salatiga bulan Juni 1961, yaitu melikuidasi HMI, dan jika kita mempelajari "Sistematika rencana kudeta PKI" yang ditulis Saudara M.Z. Masyhudi dalam Harian Suara Islam Jakarta terbitan 7 Oktober 1965, nyatalah bahwa HMI, yang harus dibubarkan sebelum Gestapu/PKI meletus, memang musuh besar PKI.

D. Gestapu dan Dampaknya

Ketua CC PKI, DN Aidit, saat memberikan ceramah di depan kursus Tavip Permusyawaratan Pelajar Indonesia (PPI, onderbouw Baperki-Cina Komunis) di Gedung Pemuda, Jakarta tanggal 10 Maret 1965, antara lain, mengatakan: "Seharusnya tidak ada plintat-plintut terhadap HMI. Saya menyokong penuh tuntutan pemuda, pelajar, dan mahasiswa Indonesia yang menuntut pembubaran HMI, yang seharusnya sudah lama bubar bersamaan dengan bubarnya Masyumi".(Agussalim Sitompul, 2008).

Setelah menjangkau masyarakat Pelajar, perhatian beralih ke pengembangan masyarakat mahasiswa oleh PKI. Melalui CGMI, yang sejak 1964 mengklaim sebagai organisasi mahasiswa progresif, kader-kadernya mulai bergabung dengan GERMINDO, PERHIMI, dan GMNI. Semakin banyak kader CGMI yang bergabung, sikap mereka terhadap HMI menjadi lebih agresif, bahkan lebih tajam dibanding sikap CGMI. Ini mencerminkan perilaku PKI dan pendukungnya dalam upaya membubarkan HMI.

Di Jakarta, Surabaya, dan beberapa kota besar lainnya, hampir tiada hari terlewatkan oleh orang-orang Komunis dan golongan kiri lainnya untuk tidak berdemo menuntut pembubaran himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pada hari-hari menjelang Gestapu, sasaran terpenting pengganyangan PKI ialah HMI, organisasi mahasiswa terbesar waktu itu. "Kalau tidak bisa membubarkan HMI, pakai sarung saja," kata Aidit menghasut para anggota CGMI (Central Gerakan Mahasiswa Indonesia), organisasi mahasiswa Komunis, dalam pidatonya di Istora Senayan beberapa hari sebelum Gestapu. (Salim Haji Said, 2015).

Sesuai dengan karakternya, PKI memiliki kecenderungan menghancurkan kekuatan-kekuatan yang menghalangi lajunya. Maka, catat Fahry Ali, “setelah berhasil menghancurkan pengaruh Hatta, PSI, dan Masyumi, serta kekuatan-kekuatan lainnya, HMI segera menjadi target PKI berikutnya. Dari sisi ini dapat dipahami mengapa HMI termasuk kelompok yang menjadi target sasaran PKI dan Onderbouwnya, terutama CGMI. Tidak hanya membendung arus aktivitas CGMI di kampus-kampus, HMI juga berhadapan dengan anasir-anasir komunis di PT.(M. Alfian Alfian, 2014)

Jika PKI berhasil membubarkan HMI, mereka bisa menghancurkan organisasi independen lain. HMI simbol kekuatan mahasiswa yang berlandaskan nilai keislaman dan nasionalisme. Keberadaan HMI dianggap sebagai penghalang bagi dominasi ideologi komunis di kalangan pemuda. Menyadari hal ini, tentara dan kekuatan anti-komunis bekerja sama melindungi HMI. Presiden Sukarno tampaknya tidak ingin membubarkan HMI, karena itu bisa merusak keseimbangan politik antara PKI dan lawan-lawannya, terutama Angkatan Darat.

Pengaruh PKI terhadap media massa pada masa itu sangat besar. Hampir semua surat kabar dan media cetak berada di bawah kendali mereka dan kelompok kiri lainnya. Berita yang dominan adalah laporan tentang tindakan terhadap yang dianggap kontra-revolusioner. Media yang tidak mengikuti ideologi PKI dibungkam atau dilikuidasi, sering kali dengan bantuan kekuasaan politik di bawah Sukarno. Even Kantor Berita Antara, yang merupakan sumber utama informasi, berhasil direbut oleh PKI setelah menyingkirkan pendirinya. Dengan menguasai Antara, PKI dapat membentuk opini publik sesuai kepentingan ideologisnya. (Herbert Feith, 2006)

PKI memiliki tujuan penting atas tuntutannya untuk membubarkan HMI berikut beberapa tujuannya akan penulis uraikan

1. Memotong kader umat Islam dan bangsa Indonesia yang akan dicetak HMI.
2. Menguasai Perguruan Tinggi untuk berusaha menguasai masa depan Bangsa.

3. Memecah belah kekuatan mahasiswa sebagai angkatan muda khususnya dan kekuatan bangsa Indonesia pada umumnya.
4. Melatih dan mempersiapkan kader-kader CGMI/PKI.
5. Mematangkan situasi dan checking up kader-kader PKI untuk persiapan gerakan kontra revolusi Gestapu/PKI,)

Dari tujuan di atas, mungkin kita bisa melihat jelas PKI terlihat mempunyai maksud dan latar belakang yang jauh. Selain itu PKI juga memberikan beberapa tuduhan atau dalih yang dibuat, sebagai alasan untuk menuntut pembubaran HMI yang sangat banyak sekali, antara lain:

1. HMI anti-Pancasila dan UUD 1945.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sering dianggap sebagai kelompok yang menentang Presiden Soekarno dan tidak loyal kepada Pemimpin Besar Revolusi. Tuduhan ini muncul selama ketegangan politik di tahun 1950-an hingga awal 1960-an, ketika HMI dianggap tidak sejalan dengan ideologi negara. Ketegangan meningkat setelah pemberontakan PRRI dan gerakan PERMESTA, yang dianggap pemerintah sebagai pengkhianatan. Sikap kritis HMI terhadap kebijakan pemerintah membuatnya rawan dicap tidak loyal kepada kepemimpinan nasional.

2. HMI anak kandung partai terlarang Masyumi.

HMI pro-Malaysia, HMI kontrarevolusi/reaksioner dan kepala batu.
2.7. HMI antek Nekolim dan Imperialisme, komprador Amerika dan agen CIA.

- a. HMI antek Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII).
- b. HMI terlibat gerakan rasialis 10 Mei 1963 di Jawa Barat.
- c. HMI terlibat dalam peristiwa 10 Oktober 1963 di IAIN Yogyakarta, dan 17 Oktober 1963 di IAIN Ciputat,
- d. HMI terlibat dalam percobaan pembunuhan Presiden Soekarno dalam peristiwa Cikini, tanggal 30 November 1957, di Jalan Cenderawasih, Makassar tahun 1964.
- e. HMI terlibat dalam pemberontakan Andi Sele di Pinrang, Sulawesi Selatan.
- f. HMI terlibat dalam peristiwa PUSKAV (Pusat Kavaleri) di Bandung, tanggal 19-20 Maret 1960.

- g. HMI antek Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS) dan Manifesto Kebudayaan (MANIKEBU).
- h. HMI anti-persatuan bangsa.
- i. HMI adalah setan kota.

Fitnah dan olok-olok yang dilancarkan kaum Komunis ini, adalah tuduhan yang serainpangan tanpa fakta, hanya isapan jempol, Nyata sekali bahwa PKI berusaha mati-matian untuk menghilangkan jejak-jejak pemberontakannya di Madiun tahun 1948, sewaktu seluruh rakyat Indonesia sedang berjuang melawan penjajahan Belanda.

Tuduhan itu semua adalah tuduhan sepihak, yaitu dari kaum Komunis. PKI tidak senang dan rela jika HMI jaya. Pemerintah sendiri tidak pernah melontarkan tuduhan yang keji itu ke alamat HMI. Dikatakan HMI terlibat dalam Peristiwa PUSKAV, yaitu penyerobotan Puskav, oleh 4 orang anggota ABRI di Bandung tanggal 19-20 Maret 1950 untuk melancarkan suatu pemberontakan keputusan Mahkamah Angkatan Darat dalam sidangnya yang ke-7 dan terakhir yang dilangsungkan di Bandung tanggal 20 September 1960 menjelaskan bahwa perkara itu sama sekali tidak menyangkut keterlibatan nama HMI.

Dalam keputusan Hakim, semua tertuduh telah dikenakan hukuman, di mana 4 orang terdakwa semuanya adalah anggota ABRI, tidak seorang pun dari sipil, apa lagi dari anggota HMI. Tentang pemberontakan Andi Sele di Pinrang tahun 1964. Ketika itu, Cabang HMI di Pinrang belum ada. Praktis tidak ada anggota HMI di Pinrang. HMI anti-persatuan bangsa. Jika HMI anti-persatuan bangsa, tidak mungkin anggota-anggota HMI terdiri atas mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari semua daerah di Kepulauan Indonesia ini. (Agussalim Sitompul, 2008)

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berhasil bertahan dan menang dalam krisis politik Indonesia pada tahun 1960-an. Meski mendapat tekanan dari Partai Komunis Indonesia (PKI), HMI selamat dari ancaman pembubaran, sementara PKI justru dibubarkan oleh Soeharto. Keberhasilan HMI didukung oleh strategi politik yang cerdas dan dukungan dari Soekarno serta tokoh-tokoh lain, menegaskan HMI sebagai pelindung Pancasila dan pembela konstitusi.

Dalam laporan resmi Pengurus Besar HMI di Kongres VII di Solo, Ketua Umum Sulastomo menjelaskan strategi politik HMI yang disusun untuk merespons perubahan zaman. Strategi ini bertujuan menjaga keseimbangan kekuatan politik nasional dan menjadikan HMI sebagai aktor aktif. Fokus utama mencakup integrasi umat Islam, pembangunan persatuan, peneguhan Pancasila, dan peningkatan kualitas kader. HMI juga menerapkan kebijakan internal yang mendukung Orde Baru dan rehabilitasi mental berbasis Ketuhanan Yang Maha Esa, serta waspada terhadap gerakan politik lama dengan berpegang pada pendekatan konstitusional. (M. Alfian Alfian, 2014)

Setelah Peristiwa G30S/PKI, politik di Jakarta berubah besar dengan munculnya demonstrasi anti-Komunis. Aksi-aksi ini mulai kecil, namun meningkat setelah pemakaman para jenderal yang menjadi korban. Semangat demonstrasi tumbuh kuat dengan satu tuntutan utama: "Bubarkan PKI". Seruan ini mencerminkan kemarahan publik terhadap PKI dan solidaritas untuk para korban. Aksi ini menandai awal tekanan yang semakin besar terhadap Partai Komunis Indonesia. (Salim Haji Said, 2015)

Para pimpinan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menjalin hubungan dekat dengan militer, terutama Jenderal Ahmad Yani, karena ancaman PKI. Dr. Fahmi Idris, tokoh HMI yang kelak jadi menteri, berbagi pengalamannya berkomunikasi dengan Jenderal Yani tentang masalah ini. Pertemuan difasilitasi oleh Rully Yani, mahasiswi HMI. Menariknya, salah satu putri Jenderal Yani aktif di GMNI, yang dekat dengan PNI dan Sukarno, menunjukkan kompleksitas hubungan sosial dan ideologi di kalangan elite saat itu. (Salim Haji Said, 2015)

Jaringan komunikasi HMI tidak hanya melibatkan Jenderal Yani, tetapi juga tokoh militer penting lainnya seperti Jenderal Achmad Sukendro, Jenderal Alamsyah, dan Jenderal Muchlas Rowi. Fahmi Idris menyebutkan bahwa ia dan rekan-rekannya dari HMI pernah mengikuti pelatihan intelijen tempur di Jawa Barat yang diadakan oleh militer. Dalam pelatihan itu, mereka belajar taktik untuk menghadapi musuh tanpa senjata sebagai upaya pertahanan sipil terhadap ancaman politik dari unsur komunis. Hubungan ini menunjukkan bahwa HMI aktif secara ideologis dan juga

terlibat dalam pertahanan sosial-politik bangsa melawan ancaman ideologi yang tidak sejalan dengan Pancasila. (Salim Haji Said, 2015)

Setelah Gestapu, dr. Sulastomo, Ketua HMI waktu itu, sibuk menyelamatkan anak-anak HMI yang diselundupkan sebagai petugas intel ke dalam PKI. “Wah, repot, mereka dikira PKI betulan,” kata sulastomo. Menyelundupkan anak-anak HMI ke dalam PKI dimungkinkan oleh adanya kerja sama HMI dengan jaringan intel Angkatan Darat. (Salim Haji Said, 2015)

Dalam suasana politik yang tegang, mahasiswa Islam dan nasionalis moderat meminta Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) mengadakan kongres luar biasa. Tujuannya untuk memperkuat posisi mahasiswa dalam menuntut pertanggungjawaban atas tragedi G30S dan mengecam PKI. Namun, organisasi mahasiswa kiri seperti GMNI dan CGMI menolak dan memilih menunggu arahan dari Presiden Soekarno untuk menjaga stabilitas politik. Akibatnya, rapat PPMI antara 10 dan 23 Oktober 1965 tidak mencapai kesepakatan, menunjukkan perpecahan dalam gerakan mahasiswa antara anti-komunis dan simpatisan Sukarno.

Beberapa organisasi mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), PMKRI, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) serta Sekretariat Organisasi Mahasiswa Lokal (SOMAL) mendesak agar Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) untuk segera mengadakan Kongres. Dorongan ini untuk membuat PPMI menyerang PKI atas Gerakan 30 September. Dorongan tersebut ditolak oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan organisasi mahasiswa kiri seperti Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI). Gerakan Mahasiswa Indonesia (Germindo), juga Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (Perhimi), untuk menunggu solusi politik dari Presiden Soekarno paska peristiwa 30 September 1965. Rapat presidium PPMI digelar pada 10-23 Oktober 1965 untuk menentukan sikap gerakan mahasiswa terhadap G30S tidak mencapai kesepakatan. (M. Alfian Alfian, 2014)

E. Pembentukan KAMI dan TRITURA

Pada awal tahun 1966, kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) semakin aktif melakukan aksi

di berbagai kota, terutama di Jakarta. Mereka melakukan demonstrasi besar-besaran dengan semangat anti-komunis. Pada 10 Januari 1966, ribuan mahasiswa, terutama dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menyatakan Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA). TRITURA berisi tiga tuntutan utama: pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), pembersihan kabinet Dwikora dari unsur pro-komunis, dan penurunan harga kebutuhan pokok yang melonjak. TRITURA menjadi simbol perlawanan mahasiswa terhadap ketidakstabilan nasional dan menekan pemerintah Presiden Soekarno.

Pada tanggal 24 Februari 1966, saat pelantikan Kabinet Dwikora oleh Presiden Soekarno, terjadi demonstrasi besar oleh mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang menuntut perubahan. Ribuan orang turun ke jalan, khususnya di Jalan Merdeka Utara, tetapi aksinya berakhir tragis ketika aparat keamanan menembaki demonstran. Dua orang, Arief Rahman Hakim dan Zubaedah, tewas dalam insiden ini, yang meningkatkan kemarahan publik dan ketegangan antara pemerintah dan mahasiswa. Sebagai respons, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan No. 41/Kogam/1966 untuk membubarkan KAMI dan memberlakukan pembatasan ketat, termasuk larangan berkumpul lebih dari lima orang dan jam malam. Pemakaman Arief pada 27 Februari 1966 dihadiri oleh pimpinan militer, yang menunjukkan dukungan mereka terhadap perjuangan mahasiswa. (M. Alfian Alfian, 2014)

F. Akhir Konflik dan Kemenangan HMI

Setelah rangkaian panjang demonstrasi yang dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), situasi politik Indonesia mencapai titik krusial. Pada dini hari tanggal 12 Maret 1966, Letnan Jenderal Soeharto secara resmi menyatakan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) atas dasar Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Pernyataan ini menjadi pukulan fatal bagi eksistensi PKI sebagai kekuatan politik di Indonesia. Tidak hanya secara administratif, pembubaran tersebut juga memicu gelombang kekerasan massal di berbagai daerah, di mana ribuan simpatisan dan

anggota PKI menjadi sasaran amarah rakyat yang meluap. Peristiwa ini menandai awal dari babak baru dalam sejarah Indonesia, di mana kekuatan anti-komunis mengambil alih dominasi politik nasional dan mengkonsolidasikan kekuasaan militer dalam dinamika pemerintahan Orde Baru.

Kesimpulan

Pada era 1960-an, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menjadi salah satu organisasi mahasiswa Islam yang paling kuat dan berpengaruh di Indonesia. Sikap tegas HMI yang anti-komunisme menjadikannya sasaran utama serangan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi-organisasi afiliasinya seperti CGMI dan BTI. Konflik antara kelompok Islam dan Komunis semakin memanas seiring berkembangnya kebijakan NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis) yang menciptakan ketidakseimbangan kekuatan politik. PKI yang semakin dominan mulai berupaya membubarkan HMI karena dianggap sebagai penghalang utama bagi ambisi politik mereka. Penyerangan terhadap pesantren, penghinaan terhadap simbol-simbol agama, serta pelecehan terhadap tokoh-tokoh Islam menjadi pemicu kemarahan umat Islam. Beberapa kejadian penting seperti Tragedi Kanigoro, di mana kader Pelajar Islam Indonesia (PII) diserang secara brutal, menunjukkan kebrutalan kelompok komunis terhadap umat Islam. Selain itu, HMI dituduh oleh PKI terlibat dalam berbagai konspirasi dan pemberontakan, namun tuduhan-tuduhan tersebut tidak terbukti dan hanya merupakan propaganda politik.

Strategi PKI untuk membubarkan HMI dilakukan melalui propaganda, aksi demonstrasi besar-besaran, dan tekanan politik. Namun, HMI berhasil bertahan berkat dukungan dari umat Islam, kekuatan mahasiswa, serta hubungan strategis dengan militer, khususnya Angkatan Darat. Bahkan, setelah meletusnya Gerakan 30 September (G30S/PKI), HMI menjadi salah satu kekuatan utama yang menuntut pembubaran PKI bersama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Puncaknya, setelah serangkaian aksi demonstrasi besar dan penolakan terhadap kekuasaan PKI, pada 12 Maret 1966, melalui Supersemar, Presiden Soekarno

memberikan mandat kepada Jenderal Soeharto yang langsung digunakan untuk membubarkan PKI. Keputusan ini menjadi titik balik penting yang menandai kemenangan HMI dan kekuatan anti-komunis dalam prahara politik Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alfian, M. A. (2014). *HMI 1963–1966: Menegakkan Pancasila di Tengah Prahara*. Jakarta: Kompas.
- Ferrdiawan, W., Basri, M., & M. Syaiful. (2015). Upaya lobby Himpunan Mahasiswa Islam pada Soekarno pada tahun 1965. *Jurnal FKIP Unila, Vol. 3, No. 5*.
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep keadilan delik pembunuhan dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, 2(2)*, 144–159. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>
- Hukumonline. (n.d.). PERADI, HKHPM dan AKHI surati Ketua MA soal sumpah advokat. *Hukumonline.com*. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5731d94e12b88/peradi--hkhpm-dan-akhi-surati-ketua-ma-soal-sumpah-advokat> (Diakses 11 Mei 2023)
- Kurniawan, A., dkk. (2017). Perkembangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Banda Aceh Tahun 1962–1998. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (HIM) Pendidikan Sejarah Unsyiah, Vol. 2, No. 3, Juli*.
- Prayoga, D. A., dkk. (2020). *Sejarah Perkembangan Organisasi Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Pacitan Tahun 1998–2020*. Pacitan: Pendidikan Sejarah STKIP PGRI.
- Ramli. (2022). Kontribusi studi kawasan bagi paradigma keilmuan Acehnologi. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman, 13 (1)*, 1–20. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bidayah/issue/view/80>
- RMOL. (2020). 1963–1966: Tahun-tahun Tantangan bagi HMI Menghadapi PKI. *RMOL.ID*. <https://rmol.id/publika/read/2020/10/13/456416/1963-1966-tahun-tahun-tantangan-bagi-hmi-menghadapi-pki> (diakses 9 Juni 2025).

- Said, S. H. (2015). *Gestapu 65*. Jakarta Selatan: PT Mizan Pustaka.
- Sitompul, A. (2008a). *Sejarah Perjuangan HMI 1947–1975*. Jakarta: CV Misaka Galiza.
- Sitompul, A. (2008b). *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa: Pemikiran Keislaman dan Keindonesiaan HMI (1947–1997)*. Jakarta: Misaka Galiza.
- Tanja, V. (1991). *Himpunan Mahasiswa Islam: Sejarah dan Kedudukannya di Tengah Gerakan-Gerakan Muslim Pembaharuan di Indonesia (Cet. 2)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tillich, P. (1952). Being and love. Dalam R. N. Anshen (Ed.), *Moral Principles of Action*. New York: Harper & Bros.
- Wahid, A., Tjokroaminoto, D., Raharjo, D., & Hanafi, H. (2000). *Islam, Sosialisme dan Kapitalisme*. Jakarta: Madani Press.
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.